

PERENCANAAN WILAYAH BERBASIS KESERASIAN LINGKUNGAN FISIK DAN KONDISI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Listumbinang Halengkara

Dosen Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lampung

Email: halengkara@gmail.com

Abstrak

Perencanaan wilayah yang matang merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Dengan kata lain kegiatan perencanaan wilayah ini merupakan tahapan kegiatan yang wajib dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan aspek-aspek yang lainnya. Semakin banyak aspek yang digunakan sebagai pertimbangan, maka hasil perencanaan wilayahnya akan semakin baik.

Penelitian ini mencoba mengkombinasikan antara aspek fisik dan aspek kependudukan sebagai pendekatan dalam melakukan perencanaan wilayah di Provinsi Lampung. Indikator aspek fisik yang dipilih adalah tingkat kekritisian lahan karena kekritisian lahan ini juga telah digunakan hampir di semua provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan di wilayah masing-masing. Sedangkan indikator aspek kependudukan yang dipilih terdiri dari komponen demografi, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan. Tiap komponen ini terdiri dari beberapa variabel yang dipilih sesuai kelengkapan data yang ada kemudian diharkatkan dan dikelaskan. Pengharkatan atau scoring dilakukan dengan asumsi bahwa semakin baik keadaan penduduk maka harkat yang akan diberikan juga semakin besar dan pada akhirnya nanti akan diperoleh nilai indeks kependudukan.

Analisis data dilakukan dengan tumpang-susun (overlay) peta menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengetahui bentuk keserasian antara kekritisian lahan dengan indeks kependudukan pada masing-masing wilayah kabupaten di Provinsi Lampung. Hasil keserasian inilah yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perencanaan wilayah di Provinsi Lampung.

Kata kunci: perencanaan wilayah, lahan kritis, indeks kependudukan, SIG

PENDAHULUAN

Perencanaan wilayah yang baik dan matang merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Dengan kata lain kegiatan perencanaan wilayah ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam setiap siklus pembangunan wilayah. Perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

yang tersedia (UU No 25 Tahun 2004). Sedangkan perencanaan wilayah atau perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka

mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi dan Deddy Bratakusumah, 2004).

Proses pembangunan wilayah di Indonesia selalu diawali dengan proses perencanaan yang matang. Namun demikian masih terdapat berbagai kekurangan dan permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan tersebut. Menurut Muta'ali (2014) beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan antara lain adalah belum sinergisnya antara proses perencanaan dari pendekatan politik dan pendekatan teknokratik, kurang operasionalnya dokumen perencanaan, ego sektoral yang masih tinggi, dokumen perencanaan yang kurang mengakomodasi kebutuhan sebenarnya di masing-masing daerah, kelemahan penggunaan data primer dan sekunder untuk memproyeksikan arah pembangunan, inkonsistensi antara perencanaan dan pendanaan, serta belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan. Berbagai permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan perencanaan di Indonesia.

Muta'ali (2014) lebih lanjut juga menjelaskan bahwa kegagalan dalam proses perencanaan juga disebabkan karena beberapa hal, yaitu ketidak sesuaian paradigma perencanaan dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara berkembang, ketidak sesuaian perencanaan dan pelaksanaan akibat kurangnya kompetensi dari aparat pelaksana dan kurangnya partisipasi dari masyarakat, perencanaan yang terlalu bersifat kaku dan tidak operasional, serta lemahnya kemampuan teknis yang didukung oleh keterbatasan data/informasi sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak realistis dan sulit dilaksanakan.

Banyaknya permasalahan yang sering dijumpai dalam proses perencanaan wilayah masih cukup memberikan peluang bagi lahirnya alternatif-alternatif teknik perencanaan wilayah yang dapat diterapkan di suatu daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dicoba salah satu alternatif lain dalam teknik perencanaan wilayah dimana dalam proses perencanaan wilayahnya akan digunakan suatu teknik analisis yang mempertimbangkan keserasian antara aspek lingkungan fisik dan aspek kependudukan. Penggunaan kondisi kependudukan sebagai salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan merupakan upaya untuk memasukkan unsur sumberdaya manusia yang seringkali diabaikan dalam setiap proses perencanaan wilayah. Kondisi ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahbub ul Hal (1976) yang menyatakan bahwa terdapat tujuh dosa perencana pembangunan yang dapat bermuara pada kegagalan perencanaan, yang salah satunya adalah pengabaikan faktor sumberdaya manusia. Harapannya penggunaan alternatif teknik perencanaan wilayah dengan analisis keserasian antara lingkungan fisik dengan kondisi kependudukan ini mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan lebih tepat sasaran sehingga dapat memberikan perubahan menuju terciptanya pembangunan yang lebih baik di suatu wilayah.

METODE

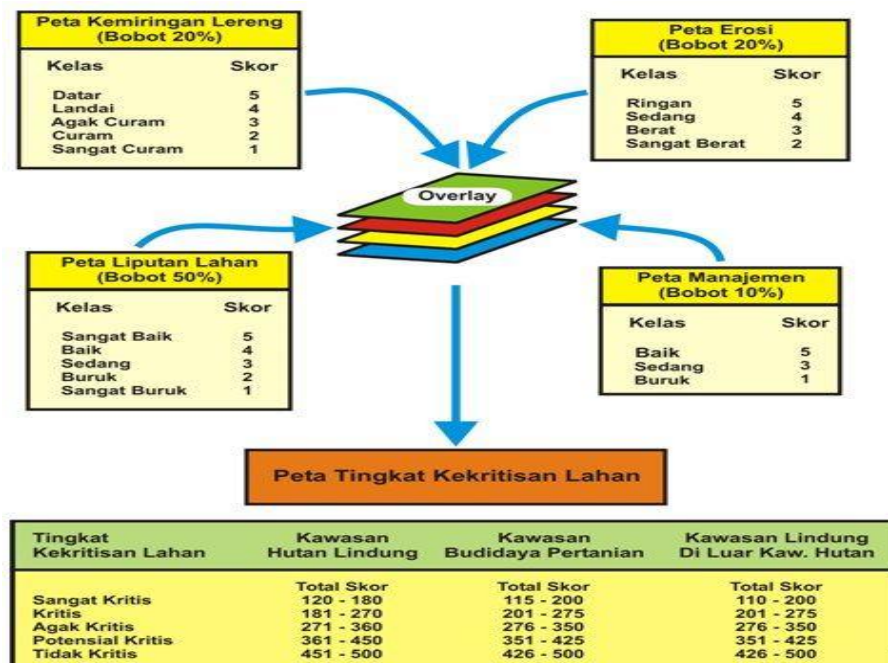
Analisis Kondisi Lingkungan

Analisis kondisi lingkungan dilakukan dengan menggunakan data kekritisan lahan. Data kekritisan lahan dipilih sebagai parameter dalam penelitian ini karena data kekritisan lahan telah

digunakan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan di berbagai wilayah. Data kekritisan lahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kekritisan lahan yang telah disusun oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung (WSS) dimana wilayah kerja BPDAS WSS ini meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung dan sebagian wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan peta lahan kritis Provinsi Lampung, BPDAS WSS

menggunakan kriteria lahan kritis menurut Peraturan Menteri Kehutanan (P.32/Menhut-II/2009) sedangkan secara teknis, metode yang digunakan merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 4/V-SET/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis. Sesuai dengan petunjuk teknis tersebut, langkah-langkah dan parameter-parameter yang digunakan dalam pemetaan lahan kritis dapat dilihat pada diagram alir yang disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Diagram Alir Penyusunan Peta Lahan Kritis

Analisis Kondisi Kependudukan

Analisis kondisi kependudukan diperoleh dengan mengumpulkan data berupa indikator kependudukan yang terdiri dari komponen demografi, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan. Tiap komponen ini terdiri dari beberapa variabel yang dipilih sesuai kelengkapan data yang ada kemudian diharkatkan dan dikelaskan. Pengharkatan atau *scoring* dilakukan dengan asumsi bahwa semakin baik keadaan penduduk maka harkat yang

akan diberikan juga semakin besar dan pada akhirnya nanti akan diperoleh angka indeks kependudukan yang akan disajikan secara spasial dalam bentuk peta dengan menggunakan wilayah administrasi berupa kabupaten sebagai unit pemetaannya. Harkat yang digunakan dalam analisis kondisi kependudukan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komponen Kependudukan dan Masing-Masing Variabel yang Digunakan

Komponen	Variabel	Kelas	Harkat
Demografi	Kepadatan Penduduk	Rendah	3
		Sedang	2
		Tinggi	1
	Pertumbuhan Penduduk	Rendah	3
		Sedang	2
		Tinggi	1
Ekonomi	Pengeluaran per Kapita	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1
	Persentase KK Pra KS dan KS 1	Rendah	3
		Sedang	2
		Tinggi	1
Sosial Budaya	Rata-rata lama sekolah	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1
	Angka Melek Huruf	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1

Sumber: Halengkara, 2007 dengan modifikasi

Analisis Keserasian Kondisi Lingkungan Fisik dan Kondisi Kependudukan di Provinsi Lampung

Analisis keserasian antara kondisilingkungan fisik yang diwakili dengan peta kekritisan lahan dengan kondisi kependudukan yang diwakili dengan peta Indeks Kependudukan (IK) dilakukan dengan metode penampalan atau tumpang susun pada kedua peta tersebut. Nantinya akan ada 4 macam kemungkinan hubungan antara kekritisanlahan dengan IK. Hubungan ini dapat dilihat juga sebagai keserasian antara kondisi lingkungan fisik dengan kondisi kependudukan. Kemungkinan hubungan yang pertama adalah dimana kondisi lingkungan fisik maupun

kependudukannya sama-samabaik. Sifat hubungan inilah yang dapat dikatakan serasi. Kemungkinan tipe kedua adalah suatu daerah dengan kondisi lingkungan fisik yang baik namun dengan IK rendah. Kemungkinan tipe ketiga adalah kebalikan dari tipe kedua, yaitu dimana pada suatu daerah dengan kondisi lingkungan fisik kurang baik namun dengan IK tinggi. Kemungkinan tipe yang terakhir atau yang keempat adalah daerah dimana baik kondisi lingkungan fisik maupun IK-nya sama-sama rendah.

Analisis keserasian dilakukan dengan melihat sifat hubungan antara kekritisan lahan dengan kondisi kependudukan yang terdapat di tiap

kabupaten di Provinsi Lampung. Keserasian diperoleh apabila ada keseimbangan yang baik antara kondisi lingkungan fisik dan kondisi kependudukan di wilayah tersebut.

Apabila ada ketimpangan antara keduanya, maka wilayah tersebut dikatakan tidak serasi. Penjelasan secara rinci mengenai penentuan tingkat keserasian dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Keserasian Kondisi Lingkungan Fisik dan Kondisi Kependudukan

Kondisi Lingkungan Fisik (Kekritisian Lahan)	Kondisi Kependudukan (Nilai Indeks Kependudukan)		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kritis	Tidak Serasi	Tidak Serasi	Tidak Serasi
Sedang	Serasi	Agak Serasi	Tidak Serasi
Tidak Kritis	Serasi	Serasi	Tidak Serasi

Sumber: Halengkara, 2007 dengan modifikasi

Strategi Perencanaan Wilayah

Penetapan alternatif model perencanaan wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan hasil analisis keserasian antara kondisi lingkungan fisik dan kondisi kependudukan yang telah diperoleh. Pada wilayah dengan keserasian tipe satu, perencanaan dan pembangunan wilayah sebenarnya dapat dikatakansudah baik. Yang diperlukan adalah upaya-upaya yang arahnya untuk mempertahankan keadaan yang sudah baik tersebut. Wilayah dengan keserasian tipe satu ini hendaknya tidak lagi dijadikan wilayah prioritas dalam perencanaan maupun pengembangan wilayah. Pada wilayah dengan keserasian tipe yang kedua, sebaiknya mendapatkan prioritas pengembangan yang dipusatkan pada sektor kependudukan dalam upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi demografi, ekonomi, sosial budaya, hingga kesehatan. Pada wilayah dengan keserasian tipe yang ketiga, diperlukan langkah-langkah perencanaan yangmemprioritaskanpada rehabilitasi lahan dan peningkatan produktivitas lahan agar dapat memenuhikebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Wilayah dengan keserasian tipe keempat, sebaiknya ditetapkan sebagai prioritas utama dalam setiap upaya perencanaan dan pengembangan wilayah

baik di sektor fisik berupa rehabilitasi lahan maupun pengembangan sumberdaya manusia agar daerah ini tidak menjadi daerah yang tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta kekritisian lahan yang diperoleh dari BPDAS Way Seputih Way Sekampung memiliki satuan unit pemetaan (*land mapping unit*) berupa batas fisiografi. Padahal dalam penelitian ini, satuan unit pemetaan yang akan digunakan adalah batas administrasi berupa kabupaten. Oleh karena itu perlu dilakukan konversi terlebih dahulu pada peta kekritisian lahan tersebut. Konversi peta kekritisian lahan ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap yang pertama adalah generalisasi kelas kekritisian lahan dari lima kelas (sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis) menjadi tiga kelas saja, yaitu kritis, sedang, dan tidak kritis. Tahap yang kedua adalah mengubah satuan unit pemetaannya menjadi per kabupaten. Cara yang dilakukan adalah dengan memilih kelas kekritisian lahan yang paling dominan untuk mewakili masing-masing kabupaten. Untuk mengetahui tingkat kekritisian dalam dalam setiap wilayah administrasi khususnya wilayah administrasi kabupaten di Provinsi Lampung, maka dilakukan

overlay antara peta lahan kritis dengan peta batas administrasi kabupaten di Provinsi Lampung. Sebaran kelas

kekritisan lahan pada masing-masing kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sebaran Kelas Kekritisan Lahan pada Tiap Kabupaten Di Provinsi Lampung

Kabupaten	Kekritisan Lahan (Ha)			Luas Total (Ha)
	Kritis	Sedang	Tidak Kritis	
Bandar Lampung	2.804	8.464	6.526	17.794
Lampung Barat	88.568	84.796	4.468	177.832
Lampung Selatan	23.895	51.694	130.486	206.075
Lampung Tengah	38.035	70.859	343.923	452.817
Lampung Timur	37.337	119.738	244.251	401.326
Lampung Utara	34.394	60.933	134.688	230.015
Mesuji	11.828	41.348	161.726	214.902
Metro	0	0	7.079	7.079
Pesawaran	46.923	50.609	33.179	130.711
Pesisir Barat	92.715	151.047	53.707	297.469
Pringsewu	9.998	18.476	26.670	55.144
Tanggamus	157.022	116.698	30.144	303.864
Tulangbawang	364	91.550	233.688	325.602
Tulangbawang Barat	8.148	20.642	97.199	125.989
Way Kanan	88.662	182.313	99.161	370.136
Luas Total (Ha)	640.693	1.069.167	1.606.895	3.316.755

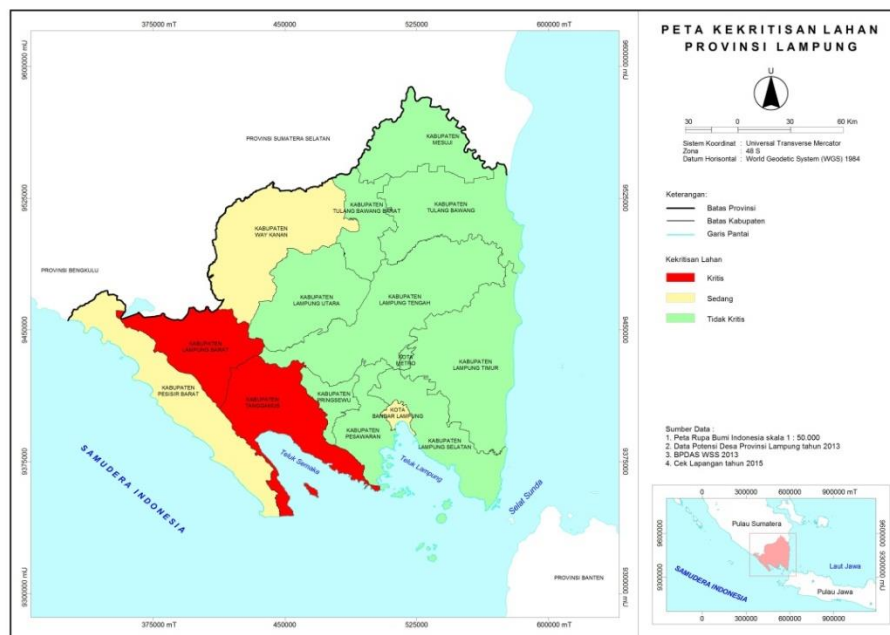
Sumber: BPDAS WSS, 2013

Peta kekritisan lahan dapat dilihat pada Gambar 3.1. sedangkan hasil

konversinya dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.1. Peta Kekritisan Lahan Wilayah Kerja BPDAS Way Seputih Way Sekampung



Gambar 3.2. Peta Kekritisan Lahan per Kabupaten di Provinsi Lampung

Pada peta hasil konversi menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung terdapat dua kabupaten yang didominasi oleh lahan yang kritis, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Selain itu juga terdapat dua kabupaten dan satu kota yang didominasi oleh kekritisan lahan dengan kelas sedang atau dapat dikatakan juga merupakan wilayah yang potensial kritis, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Sedangkan sepuluh kabupaten lainnya memiliki kondisi lingkungan fisik yang baik.

Analisis kondisi kependudukan melalui perhitungan indeks kependudukan (IK) diawali dengan pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Lampung tahun 2013 dan tahun 2014. Secara lengkap data pada masing-masing parameter IK dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Data Parameter Indeks Kependudukan per Kabupaten Di Provinsi Lampung

Nama Kabupaten	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	% Pra KS	% KS I	Rerata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf	IPM	Angka Harapan Hidup
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bandar Lampung	3183,00	2,04	638,04	25,53	28,42	10,30	98,50	76,83	71,61
Lampung Barat	134,00	1,05	609,69	20,37	25,19	7,47	97,36	70,17	67,77
Lampung Selatan	1358,00	1,22	617,36	41,12	23,86	7,50	94,94	70,95	69,05
Lampung Tengah	319,00	1,08	626,14	31,10	31,11	7,60	93,74	71,81	69,72
Lampung Timur	186,00	1,11	616,69	28,20	24,66	7,60	93,74	71,64	70,74

Lampung Utara	220,00	0,68	617,67	39,68	26,79	8,10	95,71	71,18	68,49
Mesuji	88,00	0,80	602,26	20,83	28,47	6,39	93,30	68,30	68,50
Metro	2484,00	1,65	636,08	13,83	19,77	10,15	98,40	77,30	72,98
Pesawaran	186,00	1,28	613,62	40,52	22,13	7,53	96,76	70,90	68,71
Pesisir Barat	51,00	1,05	609,69	20,37	25,19	7,47	97,36	70,17	67,77
Pringsewu	607,00	1,08	632,20	29,99	23,19	8,62	95,09	72,80	68,77
Tanggamus	185,00	1,28	626,37	33,84	25,00	7,43	95,48	72,32	70,15
Tulang Bawang	121,00	1,47	621,81	40,94	31,98	7,39	95,79	71,60	69,41
Tulang Bawang Barat	216,00	1,03	607,88	27,17	26,69	7,49	93,88	69,68	68,78
Way Kanan	108,00	1,22	611,10	29,63	43,13	7,33	94,91	70,84	69,96

Sumber: BPS, 2013

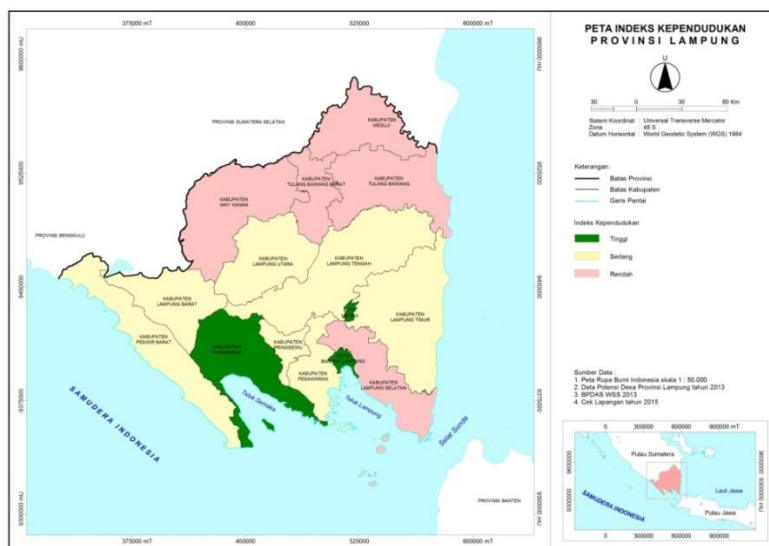
Data tiap parameter kependudukan tersebut kemudian dikelaskan dan diberi harkat yang sesuai dengan tingkatan masing-masing kelasnya. Selanjutnya dilakukan penjumlahan untuk memperoleh skor total berupa angka

Indeks Kependudukan pada masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Hasil analisis IK setelah proses pengharkatan dapat dilihat pada Tabel 3.3. sedangkan sebarannya secara spasial dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Tabel 3.3. Hasil Analisis Indeks Kependudukan Tiap Kabupaten Di Provinsi Lampung

Nama Kabupaten	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4	SKOR 5	SKOR 6	SKOR 7	SKOR 8	SKOR 9	SKOR TOTAL	Indeks Kependudukan
Bandar Lampung	1	1	3	2	2	3	3	3	3	21	Tinggi
Lampung Barat	3	2	1	3	3	2	3	1	1	19	Sedang
Lampung Selatan	2	2	2	1	3	2	2	2	1	17	Rendah
Lampung Tengah	3	2	3	2	2	2	1	2	2	19	Sedang
Lampung Timur	3	2	2	2	3	2	1	2	2	19	Sedang
Lampung Utara	3	3	2	1	2	2	2	2	1	18	Sedang
Mesuji	3	3	1	3	2	1	1	1	1	16	Rendah
Metro	1	1	3	2	3	3	3	3	3	22	Tinggi
Pesawaran	3	2	2	1	3	2	3	2	1	19	Sedang
Pesisir Barat	3	2	1	3	3	2	3	1	1	19	Sedang
Pringsewu	3	2	3	2	3	2	2	2	1	20	Sedang
Tanggamus	3	2	3	2	3	2	2	2	2	21	Tinggi
Tulang Bawang Barat	3	2	1	2	2	2	1	1	1	15	Rendah
Tulang Bawang	3	1	2	1	2	2	2	2	2	17	Rendah
Way Kanan	3	2	1	2	1	2	2	2	2	17	Rendah

Sumber: Analisis Data, 2015



Gambar 3.3. Peta Indeks Kependudukan Per Kabupaten di Provinsi Lampung

Analisis keserasian antara kondisi lingkungan fisik dan kondisi kependudukan dilakukan setelah data kekritisan lahan dan data indeks

kependudukan diperoleh. Secara lengkap hasil analisis keserasian dapat dilihat pada Tabel 3.4.

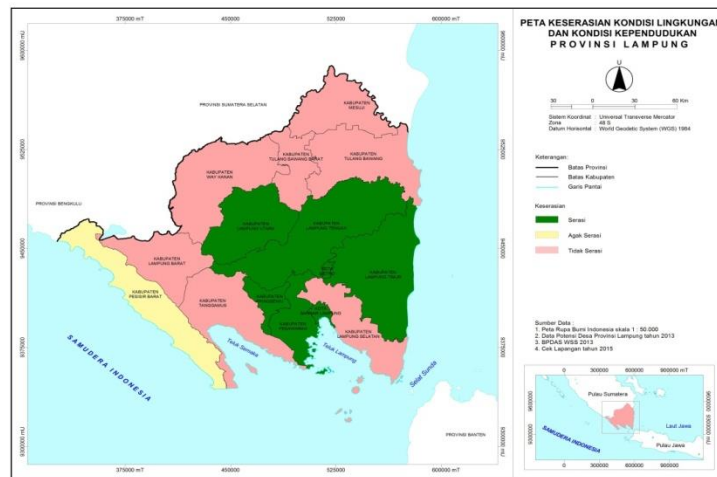
Tabel 3.4 Analisis keserasian antara kondisi lingkungan fisik dan kondisi kependudukan

Nama Kabupaten	Kekritisan Lahan	Indeks Kependudukan	Keserasian
Bandar Lampung	Sedang	Tinggi	Serasi
Lampung Barat	Kritis	Sedang	Tidak Serasi
Lampung Selatan	Tidak Kritis	Rendah	Tidak Serasi
Lampung Tengah	Tidak Kritis	Sedang	Serasi
Lampung Timur	Tidak Kritis	Sedang	Serasi
Lampung Utara	Tidak Kritis	Sedang	Serasi
Mesuji	Tidak Kritis	Rendah	Tidak Serasi
Metro	Tidak Kritis	Tinggi	Serasi
Pesawaran	Tidak Kritis	Sedang	Serasi
Pesisir Barat	Sedang	Sedang	Agak Serasi
Pringsewu	Tidak Kritis	Sedang	Serasi
Tanggamus	Kritis	Tinggi	Tidak Serasi
Tulang Bawang Barat	Tidak Kritis	Rendah	Tidak Serasi
Tulang Bawang	Tidak Kritis	Rendah	Tidak Serasi
Way Kanan	Sedang	Rendah	Tidak Serasi

Sumber: Analisis Data, 2015

Sesuai dengan hasil analisis keserasian yang ditampilkan pada Tabel 3.4, dapat dilihat bahwa di Provinsi Lampung terdapat 7 kabupaten yang serasi, 1 kabupaten agak serasi, dan 7

kabupaten yang tidak serasi. Sebaran tingkat keserasian masing-masing kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Peta Keserasian Kondisi Lingkungan dan Kondisi Kependudukan Di Provinsi Lampung

Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan 2 kota di Provinsi Lampung yang memiliki keserasian tipe pertama, dimana kondisi lingkungan fisik dan kondisi kependudukannya sama-sama baik. Oleh karena itu hendaknya kedua wilayah ini tidak ditetapkan lagi sebagai wilayah prioritas perencanaan dan pengembangan wilayah. Potensi permasalahan yang dapat terjadi di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro adalah pada faktor demografi dimana kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduknya sama-sama tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Lampung dimana dalam upaya perencanaan yang dilakukan pada kedua wilayah ini harus lebih mengarah pada upaya pengendalian penduduk. Kota Bandar Lampung secara khusus juga perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang juga mengarah pada pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini disebabkan karena wilayah Kota Bandar Lampung memiliki topografi yang cukup bervariasi. Diperlukan pengendalian alih fungsi lahan hutan menjadi bentuk penggunaan lahan lain khususnya di wilayah yang topografinya berbukit dan bergunung dengan kemiringan lereng curam.

Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang merupakan kabupaten-kabupaten dengan keserasian tipe kedua dimana kondisi lingkungan fisiknya sudah baik namun kondisi kependudukannya masih belum terlalu baik. Kabupaten-kabupaten ini membutuhkan program-program perencanaan dan pengembangan wilayah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan aspek kependudukan yang lain seperti fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus memiliki tipe keserasian yang ketiga dimana kondisi kependudukannya sudah baik namun tidak ditunjang dengan kondisi lingkungan fisik yang menunjang. Pola perencanaan dan pengembangan wilayah di kedua kabupaten ini hendaknya lebih berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, khususnya dengan program-program rehabilitasi hutan dan lahan.

Kabupaten Way Kanan merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki tipe keserasian yang keempat dimana baik kondisi lingkungan fisik maupun kondisi kependudukannya sama-sama rendah. Kabupaten Way Kanan ini sudah

sewajarnya dijadikan daerah prioritas pengembangan wilayah baik dalam rangka peningkatan produktivitas lahan, maupun dalam upaya peningkatan SDM dan aspek kependudukan yang lainnya. Jika tidak demikian maka Kabupaten Way Kanan ini akan menjadi kawasan tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung.

SIMPULAN

1. Provinsi Lampung memiliki 7 kabupaten yang serasi, 1 kabupaten agak serasi, dan 7 kabupaten yang tidak serasi.
2. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan wilayah yang paling serasi dimana kondisi lingkungan fisik maupun kondisi kependudukannya sama-sama baik.
3. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur,

Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang merupakan kabupaten-kabupaten yang memerlukan prioritas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan aspek kependudukan yang lain.

4. Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten yang membutuhkan perencanaan dan pengembangan wilayah yang lebih berorientasi pada program-program rehabilitasi hutan dan lahan serta peningkatan produktivitas lahan.
5. Kabupaten Way Kanan adalah kabupaten yang harus dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan wilayah di semua aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2013*. BPS. Lampung
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2014*. BPS. Lampung
- Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung. 2013. *Laporan Kegiatan Review Lahan Kritis Tahun 2013*. Lampung
- Halengcara, Listumbinang. 2007. *Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Kajian Keserasian Potensi Lahan dan Kependudukan Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Geografi. Yogyakarta
- Mahbul ul Haq. 1976. *Tirai Kemiskinan: Tantangan-Tantangan untuk Dunia Ketiga*. Yayasan Obor. Jakarta
- Muta'ali, Lutfi. 2014. *Perencanaan Pengembangan Wilayah: Berbasis Pengurangan Risiko Bencana*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE). Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No 4 Tahun 2013. tentang *Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis*. Jakarta
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No 32 Tahun 2009. tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai*. Jakarta
- Riyadi dan Deddy Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004. Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.